

KESIAPAN PEMERINTAH KOTA DUMAI DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN TAHUN 2015

Oleh:

Rendy Persada

Email: rendypersada@yahoo.com

Pembimbing: Afrizal S.IP MA

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

This research describes the prepared of Dumai City Government toward an ASEAN Economic Community in 2012-2015. ASEAN Economic Community are create by ASEAN Member toward a China, India and Japan economic groeth. In order that ASEAN make a common market to integrated te market in ASEAN and it will be power to support the economic groth of ASEAN members.

The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the prepared of Dumai City Government toward an ASEAN Economic Community. The theories applied in this research are liberalism perspective with the globalization theory by Robert W Cox.

The research shows that prepared of Dumai City Government toward an ASEAN Economic Community are in economic and infrastructure. Some of policies are Dumai Government increase of foregin invest in Dumai City. Create a some regulations in investment trade, increase a growth in infrastructure and Dumai Government implemented of Saving economic in subdistrict in Dumai City.

Key words: Dumai, economic community, invest and trade.

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ekonomi politik internasional yang menganalisis mengenai kesiapan Pemerintah Kota

Dumai dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kerjasama internasional adalah elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Melalui

kerjasama-kerjasama internasional, Indonesia dapat memanfaatkan peluang-peluang untuk menunjang dan melaksanakan pembangunan nasionalnya. Kerjasama ASEAN memegang peran kunci dalam pelaksanaan kerjasama internasional Indonesia karena ASEAN merupakan lingkaran konsentris pertama kawasan terdekat Indonesia dan pilar utama pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Kota Dumai merupakan salah satu wilayah di Provinsi Riau yang langsung berbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Sejak menjadi Kotamadya maka Pemerintahan Kota Dumai sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan untuk mempercepat pembangunan di Kota Dumai. Salah satu bentuk kebijakan Pemerintah pusat di Kota Dumai adalah menjadikan Kota Dumai sebagai sebuah kota perdagangan bebas dengan menjadikan pelabuhan Kota Dumai sebagai sebuah kawasan terpadu pelabuhan internasional sejak tahun 2005. Sehingga Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak menjadi hal baru lagi bagi Pemerintah Kota Dumai.

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta

memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif liberalisme, dimana dalam perspektif ini yang menjadi tujuan utama dari hubungan perdagangan adalah efisiensi untuk mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi dan

interaksi ekonomi yang dijalankan. Perspektif ini bermanfaat untuk memahami fenomena di setiap negara atau pemerintah yang berusaha untuk meningkatkan daya saing nasional dan kekuatan ekonominya untuk mendapatkan keuntungan yang ditawarkan oleh pasar internasional atau global.¹

Untuk membangun negara bangsa yang kuat untuk memerlukan pengintegrasian politik dan ekonomi sehingga negara harus melibatkan diri secara aktif untuk mengatur ekonomi demi meningkatkan kekuasaan negara. Oleh sebab itu untuk mempertahankan perekonomiannya supaya tetap kuat maka harus melakukan hubungan ekonomi melalui surplus perdagangan dengan membatasi impor dan menggalakkan ekspor sebanyak-banyaknya. Hubungan dapat disimpulkan bersifat *zero sum game* (konflik bukan bersifat harmonis). Menurut **Thomas Mun** dalam bukunya mengemukakan bahwa:

“The ordinary means therefore to encrease our wealth and treasure is by foreign trade, wherein we must ever observe this rule: to sell more to yearly than we consume of their in

value...because that that part of the stock which is not returned to us in wares must necessarily brought home ini treasure.”²

Ekonomi internasional merupakan hubungan ekonomi antarnegara di dunia. Hubungan tersebut menimbulkan saling ketergantungan (*interdependence*) antara negara satu dengan negara lainnya dan merupakan esensi yang penting untuk peningkatan kesejahteraan hidup hampir semua negara di dunia, selain itu hubungan ini tidak hanya identik dengan hubungan ekonomi internasional antarnegara namun sebagian besar berhubungan dengan perdagangan internasional. Bidang ekonomi internasional seperti pertukaran jasa, komoditi, modal, teknologi informasi dan komunikasi.

Pertukaran jasa dan komoditi terjadi antara penduduk di satu negara dengan penduduk di negara lain karena adanya keperluan untuk memperoleh jasa dan komoditi atau barang guna memenuhi kebutuhan hidup yang tidak selalu dapat dihasilkan sendiri. Pertukaran teknologi dan modal terjadi dalam rangka membantu menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya untuk

¹ Aleksijs jmadu. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu. Hal 225

² Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995. Hlm 18

pengembangan industrinya. Teknologi yang dimiliki oleh suatu negara belum cukup canggih untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi dan modal yang dimiliki suatu negara tidak memadai.

Tingkat analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tingkat negara-bangsa, dalam hubungan internasional negara sering kali yang menjadi pembuat keputusan yang tentunya tidak bertindak sendiri-sendiri namun berperan sebagai kelompok. Hubungan internasional berdasarkan analisa ini merupakan interaksi yang membentuk pola dan pengelompokan. Peranan negara sangat penting dalam kerjasama antar negara satu dengan negara lain walaupun oknum yang bekerja dalam melakukan hubungan perdagangan atau terjadinya blok perdagangan adalah kelompok importir maupun eksportir.

Menurut Mohtar Mas'ood secara umum ekonomi internasional adalah studi mengenai saling berhubungannya antara ekonomi dan politik dalam era internasional. Dalam definisi yang khusus, fokus perhatian ekonomi politik adalah hubungan antara dinamika pasar dengan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pasar ditingkat domestik

maupun internasional.³ Ekonomi internasional merupakan hubungan ekonomi antarnegara di dunia. Hubungan tersebut menimbulkan ketergantungan (*interdependence*) antara negara satu dengan negara lainnya dan merupakan esensi yang penting untuk peningkatan kesejahteraan hidup hampir semua negara di dunia, selain itu hubungan ini tidak hanya identik dengan hubungan ekonomi internasional antarnegara namun sebagian besar berhubungan dengan perdagangan internasional. Bidang ekonomi internasional seperti pertukaran jasa, komoditi, modal, teknologi informasi dan komunikasi.

Pertukaran jasa dan komoditi terjadi antara penduduk di satu negara dengan penduduk di negara lain karena adanya keperluan untuk memperoleh jasa dan komoditi atau barang guna memenuhi kebutuhan hidup yang tidak selalu dapat dihasilkan sendiri. Pertukaran teknologi dan modal terjadi dalam rangka membantu menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya untuk pengembangan industrinya. Teknologi yang dimiliki oleh suatu negara belum cukup canggih untuk mendukung

³ Mohtar Mas'ood, *Ekonomi Politik Internasional*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1990.

pelaksanaan pembangunan ekonomi dan modal yang dimiliki suatu negara tidak memadai. Globalisasi adalah suatu proses yang multi-dimensi, meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologi.⁴ Di era globalisasi beragam produk global dapat dengan mudah diperoleh di pasar sehingga konsumen benar-benar dimanjakan. M. Waters mendefinisikan konsep globalisasi sebagai sebuah proses sosial dimana halangan – halangan yang bersifat geografis pada tatanan sosial dan budaya semakin menyusut dan setiap orang semakin sadar bahwa mereka semakin dekat satu sama lain.

Selain itu Robert W Cox menjelaskan Karakteristik globalisasi adalah kecenderungan menyatunya produksi dan pembagian kerja secara internasional, perpindahan penduduk dari selatan ke utara, lingkungan kompetisi baru yang mempercepat poses itu, dan internasionalisasi negara membuat negara sebagai agen globalisasi baru.⁵ Proses globalisasi secara utuh akan membuat dunia seragam dan proses globalisasi akan

menghapus identitas dan jati diri. Kebudayaan lokal atau etnis akan ditelan oleh kekuatan budaya besar atau kekuatan budaya global. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi, yaitu sebagai berikut:⁶

1. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi komunikasi seolah - olah telah membuat batas-batas dan jarak menjadi hilang dan tak berguna.
2. Terbukanya sistem perekonomian Negara
3. Liberalisame keuangan internasional
4. Semakin besarnya keinginan orang untuk melakukan traveling antar negara atau pindah dari negara yang satu ke negara yang lain.

Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Mereka percaya bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. Proses globalisasi telah mempengaruhi perilaku konsumsi manusia menjadi

⁴ M. Waters, *Globalisation* (London : Routledge, 1995), James H. Mittelman (peny.), *Globalization : Critical Reflections* (Bouder : Lynne Rienner, 1996).

⁵ RW. Cox. *Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory*, Millenium, Vol 10 No 2.1981.

⁶ F.Kuyama. *The End of History and The Last Man*. London. 1992.

globalisasi sikap hidup dan globalisasi budaya yang disebut sebagai *consumerism*. Secara etimologis, *consumerism* berarti *the promotion of the consumer's interest* (peningkatan keinginan-keinginan konsumen).⁷ Artinya, pembelian barang dan jasa apapun dan sebanyak apapun merupakan keinginan ekonomi secara alami. Perkembangan yang begitu cepat di era globalisasi telah mengakibatkan peran pemerintah menjadi semakin memudar.

Sehingga dengan terjadinya proses globalisasi di dunia internasional mengakibatkan kaburnya batas-batas teritorial sebuah negara sehingga dalam perkembangan hubungan antara negara juga dipengaruhi oleh aktor-aktor non negara yang melewati batas teritorial Indonesia. Proses globalisasi juga membuat kegiatan-kegiatan penyelundupan semakin marak terjadi, hal ini tentu saja dikarenakan karena kaburnya batas negara dan berkurangnya wewenang negara dan berpindah kepada aktor non negara dalam pelaksanaan hubungan perdagangan antara negara.

Selain itu juga, globalisasi memiliki dampak terhadap perilaku

konsumen masyarakat disebut sebagai negara. Menurut Scholte, konsumerisme menggambarkan perilaku manusia memperoleh dengan cepat berbagai macam barang.⁸ Konsumsi dalam budaya konsumerisme tidak lagi hanya memenuhi kebutuhan tetapi telah menjadi gaya hidup global. Merek-merek global telah menjadi incaran para konsumen global. Permasalahan ini secara tidak langsung dapat disebut sebagai akibat dari dampak globalisasi. Batas-batas antara negara yang satu dengan yang lain akan semakin menghilang. Dampak global ini juga semakin dirasakan oleh Indonesia, dimana peran negara terancam oleh aktor non negara (para importir) sehingga negara tidak lagi bisa mengendalikan keinginan rakyatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ASEAN Community merupakan wujud dari kerjasama intra-ASEAN dalam Declaration of ASEAN Concord II di Bali, Oktober 2003. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu pilar dari perwujudan ASEAN Vision 2020, bersama-sama dengan ASEAN Security Community (ASC) dan ASEAN Socio-Cultural Community

⁷ Merriam Webster's Collegiate Dictionary, ed. 10 (Springfield, Massachusetts, USA : Merriam Webster, Inc.

⁸ Scholte, Globalization.

(ASCC).⁹ Suatu komunitas negara-negara ASEAN yang sangat luas, tidak ada batasan-batasan wilayah dalam bidang perekonomian. Dimana suatu negara dapat masuk bebas dalam persaingan pasar. Masyarakat ekonomi ASEAN yang bebas dari berbagai hambatan, pengutamaan peningkatan konektivitas, pemanfaatan berbagai skema kerja sama baik intra-ASEAN maupun antara ASEAN dengan negara mitra khususnya mitra FTA, serta penguatan peran pengusaha dalam proses integrasi internal ASEAN maupun dengan negara mitra.

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini dilatarbelakangi oleh persiapan menghadapi globalisasi ekonomi dan perdagangan melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA) serta menghadapi persaingan global terutama dari China dan India. Percepatan keputusan negara ASEAN untuk membentuk MEA yang pada awalnya akan dimulai pada tahun 2020 menjadi 2015 menggambarkan tekad ASEAN untuk segera meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing antar sesama negara anggota ASEAN untuk menghadapi persaingan global. MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem

perdagangan bebas antara Negara-negara ASEAN. Definisi integrasi ekonomi ASEAN secara umum adalah pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi (economic frontier) antara perekonomian Negara-negara ASEAN. Hambatan-hambatan ekonomi tersebut meliputi semua pembatasan yang menyebabkan mobilitas barang, jasa, faktor produksi, dan juga aliran komunikasi, secara aktual maupun potensial.¹⁰

Salah satu wilayah di Indonesia yang akan merasakan dampak langsung dari Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah Kota Dumai. Kota Dumai merupakan salah satu dari 12 kabupaten/ kota di Propinsi Riau ditinjau dari letak geografis, Kota Dumai terletak antara 1010 23 0 37'' – 1010 80 13'' Bujur Timur dan 1023'23'' – 1024'23'' Lintang Utara dengan luas wilayah 1.727,38 km. Kota Dumai memiliki lima (5) kecamatan dan 33 kelurahan. Sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan PDRB di Kota Dumai dengan migas tahun 2007-2010 secara berturut-turut antara lain sektor industri pengolahan (64,03%) ; sektor

⁹ Integrasi Ekonomi ASEAN 2015, <https://www.academia.edu/9503310/>(diakses tanggal 25 Juli 2015)

¹⁰ ASEAN Concord II/Bali Concord II, <http://www.aseansec.org/15159.htm>, (diakses tanggal 2 Mei 2015)

perdagangan, hotel dan restoran (12,8%) ; sektor bangunan (6,98%); sektor pengangkutan dan komunikasi 5,9%). Sektor yang kontribusinya sangat kecil yaitu sektor pertambangan dan penggalian serta sektor listrik, gas dan air bersih.

Kondisi ini cukup beralasan karena di Kota Dumai terdapat industri pengilangan minyak bumi. Peluang Investasi Hilirisasi Industri Pengolahan Kelapa Sawit di Kota Dumai Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi unggulan di Indonesia, kelapa sawit diyakini mempunyai daya saing yang kuat dibandingkan minyak nabati lainnya seperti kedelai dan kelapa. Berdasarkan data Oil World, kebutuhan minyak sawit mentah (CPO) di dunia akan mencapai 58 juta ton pada tahun 2020. Besarnya permintaan dunia menjadikan budidaya dan pengembangan usaha cukup menjanjikan.

Minyak Kelapa sawit (CPO) setelah melalui pengolahan sangat bermanfaat mulai dari industri makanan hingga industri kimia. Propinsi Riau merupakan daerah yang memiliki lahan kelapa sawit paling luas dan jumlah pabrik pengolahan sawit yang paling besar di Indonesia. Pada tahun 2011 luas lahan kelapa sawit di Propinsi Riau sebesar 2.1 Juta Ha dengan jumlah produksi 6.2 juta

ton per tahun. Jumlah Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) menjadi Minyak Sawit Mentah (CPO) sekitar 146 PKS dengan kapasitas 5.645 ton TBS/ jam. Sarana dan prasarana yang terdapat di Kota Dumai sebagai pendukung kegiatan investasi seperti Bandar udara, pelabuhan laut maupun kawasan industri sudah tersedia.¹¹

Kondisi yang dihadapi di Propinsi Riau dimana jumlah perkebunan sawit dan CPO yang dihasilkan cukup banyak namun industri hilirnya masih sangat sedikit, hal ini disebabkan karena selama ini Riau masih terkonsentrasi pada industri hulu kelapa sawit/ CPO, belum kepada industri hilirnya. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Propinsi Riau berupaya untuk memfasilitasi pengembangan industri hilir (Down Stream Industry) dari kelapa sawit terutama CPO, mengingat CPO merupakan produk utama dari perkebunan kelapa sawit. Adapun kesiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah sebagai berikut:

¹¹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai. 2012. Rencana Strategis Kota Dumai. Dumai. Bappeda. Hlm 21

1. Pemerintah Kota Dumai Meningkatkan Investasi di Kota Dumai

Sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Dumai senantiasa berada di bawah tingkat pertumbuhan tahun 2008. Pada Tahun 2008 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8,66 persen, Tahun 2009 pertumbuhannya melambat sebesar 8,43 persen, pada Tahun 2010 naik menjadi 8,60 persen, pada Tahun 2011 melambat menjadi 8,31 persen dan pada Tahun 2012 tumbuh menjadi 8,59 persen. Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas dengan adanya Kilang Putri Tujuh yang berfungsi mengolah minyak mentah memberikan andil dalam pembentukan PDRB Kota Dumai dengan Migas. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Dumai di tahun 2010 sebesar 4,10 persen, pertumbuhan ekonomi Dumai di tahun 2011 tumbuh sebesar 5,02 persen dan tahun 2012 tercatat tumbuh sebesar 5,39 persen.¹²

Pada Tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi dengan migas sebesar 2,74 persen pada Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi dengan migas naik menjadi 5,39% namun pada Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi dengan migas melambat menjadi

4,31%. Hal ini terjadi karena adanya tekanan ekonomi secara global yang memberi efek domino terhadap perekonomian nasional dan regional akibat kenaikan harga minyak bumi. Pelemahan ekonomi global juga berdampak pada ekspor sehingga menurunkan penerimaan pajak secara nasional. Pengaruh melemahnya nilai tukar rupiah juga dari Rp. 9.300/US\$ menjadi Rp.9600/US\$ juga turut memberi andil dalam melemahnya pertumbuhan ekonomi secara nasional dan regional.

Sementara secara riil, PDRB Per Kapita tanpa migas Dumai di tahun 2009 tercatat sebesar 7,8 juta rupiah dan setiap tahun meningkat hingga pada tahun 2013 (proyeksi) menjadi sebesar 9,49 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa dampak kenaikan harga (inflasi) masih terkendali sehingga daya beli PDRB Per Kapita Dumai dengan migas secara riil terus meningkat. Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA di Kota Dumai, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1.
Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Dumai tahun 2008 s.d 2012

Tahun	Uraian	PMDN	PM	Total
n	n	N	A	I
2011	Jumlah	44	22	66

¹² *Ibid*, Hlm 31

2012	Invest	46	22	68
2013	or	51	28	79

Sumber: Bappeda Kota Dumai. Tahun 2015

2. Pemerintah Kota Dumai Menyiapkan Regulasi tentang Investasi

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka Pemerintah Dumai mengeluarkan beberapa regulasi terkait kebijakan daerah Kota Dumai yang terkait bidang investasi adalah sebagai berikut:

1. Perda Kota Dumai No. 3 Tahun 2011 Tanggal 20 Januari 2011 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Kota Dumai.
2. Peraturan Walikota Dumai No. 39 Tahun 2011 Tanggal 02 Mei 2011 Tentang Pendelegasian Sebagian wewenang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Kantor/Badan Pelayanan Terpadu Kota Dumai
3. Kebijakan Pembangunan Nasional Untuk Kota Dumai (sesuai pp no. 26 tahun 2008 tentang RTRW arah): sebagai Pusat Kegiatan Nasional

(PKSN), Pelabuhan Internasional, Kawasan Andalan Duri-Dumai Dan Sekitarnya. Kota Dumai Nominasi Menjadi KEKI (UU RI No. 39 Tahun 2009. Koridor Ekonomi Indonesia (Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Papua-Kep. Maluku) Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

4. Perda Kota Dumai No. 27 Tahun 2005 Tanggal 26 Desember 2005 Tentang Perubahan Atas Perda No. 11 Tahun 2002 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kota Dumai. Kota
5. Perda Kota Dumai No. 3 Tahun 2011 Tanggal 20 Januari 2011 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Kota Dumai.
6. Peraturan Walikota Dumai No. 39 Tahun 2011 Tanggal 02 Mei 2011 Tentang Pendelegasian Sebagian wewenang Pelayanan dan

Penandatanganan Perizinan
Kepada Kantor/Badan
Pelayanan Terpadu Kota
Dumai

7. Keputusan Walikota Dumai No. 298 Tahun 2011 Tanggal 05 Januari 2011 Tentang Pembentukan TIM Pelayanan Pengaduan Investor Kota Dumai (*investor complaint service board of Dumai City*).

3. Pemerintah Kota Dumai Menyiapkan Sarana Infrastruktur dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Luas Wilayah Industri berdasarkan Perda RTRW Kota Dumai No. 27 tahun 2005 yaitu 7.772,78 Ha. Penjabaran Kawasan Industri dalam yang tertuang dalam Perda RTRW No. 27 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1. Kawasan industri Lubuk Gaung di kelurahan Tanjung Penyembal seluas lebih kurang 2.158,34 Ha;
2. Kawasan pengembangan terpadu Dock Yard di kelurahan Pangkalan sesai seluas lebih kurang 30 Ha;
3. Kawasan industri Selinsing/Pelintung di kelurahan Pelintung seluas lebih kurang 5.084,44 Ha;

4. Kawasan industri Bukit Kapur di kelurahan Kayu Kapur seluas lebih kurang 500 Ha.
5. Luas Wilayah Kebanjiran yaitu 20.653,87 Ha
6. Luas Wilayah Kemiringan 0 – 2 % : 200.750,67 Ha dan kemiringan 2 – 15 % : 3.924,07 Ha
7. Luas Wilayah Perkotaan yaitu 6.642,63 Ha¹³
8. Banyaknya jumlah Bank yang ada di Kota Dumai adalah sebanyak 24 Unit bank, baik milik swasta maupun bank milik pemerintah.

4. Pemerintah Kota Dumai Melaksanakan Program Usaha Ekonomi Simpan Pinjam dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Agenda Nasional Riau Nomor 592/IX/2004 dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS/132/III/2005 Tanggal 31 Maret 2005 mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang dituangkan secara jelas dalam pedoman umum dan

¹³ Interpretasi Citra Spot Tahun 2007

petunjuk teknis serta menunjuk lokasi penerima bantuan dana usaha Desa/Kelurahan. Program Pemberdayaan Desa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengadakan proses pembangunan yang partisipatif. Salah satu program perencanaan pembangunan partisipatif adalah program bantuan teknis (dalam rangka pemberdayaan) kepada masyarakat dan memberikan bantuan dalam bentuk stimulan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi yang diusulkan oleh masyarakat yang sifatnya bergulir. Bentuk Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah UED-SP (Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam) atau UEK-SP (Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam). UEK-SP merupakan lembaga pedesaan atau kelurahan yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di desa/kelurahan.

Perkembangan dana Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kota Dumai mengalami peningkatan dari Rp16,5 Miliar meningkat menjadi Rp92,98 Miliar dengan jumlah pemanfaat sebanyak 11.332 orang. Program UEK-SP merupakan *budget sharing* antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kota Dumai dengan cara

menyalurkan dana bergulir Rp500 juta ke 33 Kelurahan di Kota Dumai. Sumber dana UEK-SP berasal dari APBD Provinsi Riau dan APBD Kota Dumai, yang mana program tersebut bertujuan untuk mensukseskan program Sehat Ekonomi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2011-2015. Mekanisme pelaksanaan program UEK-SP ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Permohonan Kredit
2. Tahap Penilaian Kredit
3. Tahap Pemutusan dan Realisasi Kredit

Program UEK-SP Kota Dumai sudah dimulai sejak tahun 2005. Namun sampai dengan saat ini sekitar 75% dari total UEK-SP yang ada di Kota Dumai tidak berjalan efektif. Sedangkan seharusnya setelah berjalan 3 tahun dana cicilan UEK-SP harus dibayarkan setiap bulannya. Selain itu permasalahan minimnya jumlah tenaga pendamping pada program UEK-SP di Kota Dumai juga mengakibatkan program ini tidak terlaksana secara efektif. Dari 33 UEK-SP yang ada di Kota Dumai, hanya terdapat 6 orang pendamping yang bertugas di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kesiapan Pemerintah Kota Dumai dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN dilakukan dengan mempersiapkan pembangunan masyarakat Kota Dumai dibidang ekonomi, infrastruktur dan program ekonomi kreatif mikro masyarakat di Kota Dumai. Adapun beberapa terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai dalam meningkatkan ekonomi Dumai dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Dumai meningkatkan investasi dalam negeri dan asing di Kota Dumai untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Pemerintah Kota Dumai memebentuk regulasi kebijakan daerah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
3. Pemerintah Kota Dumai meningkatkan pembangunan dibidang infrastruktur
4. Pemerintah Kota Dumai melaksanakan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam di sebagian besar Kelurahan di Kota

Dumai untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat Kota Dumai.

Sehingga dengan kesiapan masyarakat Kota Dumai baik dibidang ekonomi, sarana prasarana dan infrastruktur serta program pemberdayaan masyarakat melalui program Usaha Ekonomi Simpan Pinjam di Kelurahan maka dapat meningkatkan daya saing dan mentalitas masyarakat Dumai dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Yang pada nantinya ketika arus barang dan jasa sudah bebas masuk, maka masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan seperti Kota Dumai tidak lagi terkejut dan mampu bersaing baik secara kualitas barang ataupun dengan *skill* tenaga kerja yang terampil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aleksius jemadu. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai. 2012. Rencana Strategis Kota Dumai. Dumai. Bappeda.
- Deliarnov, 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- F.Kuyama. 1992. *The End of History and The Last Man*. London.
- M. Waters, Globalisation: Routledge, 1995), *Globalization : Critical Reflections* Boulder : Lynne Rienner.
- Merriam Webster's Collegiate Dictionary, ed. 10 (Springfield, Massachusetts, USA : Merriam Webster, Inc.
- Mohtar Mas'ood, 1990. *Ekonomi Politik Internasional*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- RW. Cox. Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory, Millenium, Vol 10 No 2.1981.
- Website**
Integrasi Ekonomi ASEAN 2015, <https://www.academia.edu/9503310/>(diakses tanggal 25 Juli 2015)
- ASEAN Concord II/Bali Concord II, <http://www.aseansec.org/15159.htm>, (diakses tanggal 2 Mei 2015)